

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor
Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11
Tahun 2011 tentang Kebijakan Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12
Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14
Tahun 2011 tentang Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 tentang
Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 22 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan
DP2KBP3A Kabupaten Boyolali

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 27 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan
BP3D Kabupaten Boyolali

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 30 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas
Diskopnaker Kabupaten Boyolali

JURNAL

- Agu, C., Mbachu, C., Agu, I., Iloabachie, U., & Onwujekwe, O. (2022). An analysis on the roles and involvements of different stakeholders in the provision of adolescent sexual and reproductive health services in Southeast Nigeria. *BMC Public Health*, 22(1), 2023. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-14644-1>
- AL-Fazari, S., & Kasim, N. (2019). Role of Stakeholders in Mitigating Disaster Prevalence: Theoretical Perspective. *MATEC Web of Conferences*, 266, 03008. <https://doi.org/10.1051/mateconf/201926603008>
- Alviana, I., Rosyadi, S., Simin, S., & Idanati, R. (2021). Partisipasi Forum Anak Banyumas dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banyumas Ditinjau dari Perspektif Multi Stakeholder Partnerships. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 277–287. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i2.3738>
- Andriyanto, F., & Purnaweni, H. (2017). Analisis Stakeholders dalam Formulasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 6(2), 1–13.
- Britto, P. R. (2012). *Child Development in Developing Countries : Child Rights and Policy Implications Author (s): Pia Rebello Britto and Nurper Ulkuer Source : Child Development , JANUARY / FEBRUARY 2012 , Vol . 83 , No . 1 Published by : Wiley on behalf of the Society for . 83(1), 92–103.*

- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Lailia, I., Kismartini, & Rahman, A. Z. (2021). *Peran Stakeholders dalam Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif di Kota Semarang*.
- Lenny Rosalin, D. (2016). *Kabupaten/ Kota Layak Anak, Bahan Advokasi Kebijakan KLA*. 20.
- Moleong, L. J. (2021). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Puspitasari, M., Rodiyah, I., Publik, M. K., Airlangga, U., Publik, A., & Sidoarjo, U. M. (2022). *Keterlibatan Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sidoarjo*. 8.
- Raydais, A. E., & Damayanti, M. (2018). Peran Dan Kapasitas Pemangku Kepentingan Program Rpm Dalam Mendukung Ketersediaan Pangan Melalui Produksi Padi Di Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Ntt. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 14(3), 143.
<https://doi.org/10.14710/pwk.v14i3.19858>
- Sari, Y. R. (2021). Peran Stakeholder Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2).
<https://doi.org/10.31506/jap.v12i2.5251>
- Setiawan, B., & Nurcahyanto, H. (2018). Analisis Peran Stakeholders dalam

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. *Ilmu Sosial Fan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 9(2), 127–144.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/27351>

Syafiie, I. K. (2010). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.

UNICEF. (2018). Perlindungan anak di Indonesia - mengembangkan kebijakan dan peraturan yang kuat untuk setiap anak. *Unicef*, 1–10.
[https://www.unicef.org/indonesia/media/5651/file/Perlindungan Anak di Indonesia.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/media/5651/file/Perlindungan%20Anak%20di%20Indonesia.pdf)

Wahyuni, N., Jamilah, M., & Fajri, H. (2022). *Jurnal Public Policy Power Sharing Stakeholder of Child-Friendly City Task Force. 1.*

Windiarto, T. (2020). Issn 2089-3523. *Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA)*.

Yuningsih, T., Dm, I. H., Imam, J., Sh, B., & Semarang, N. (2021). *Peran Stakeholder Dalam Upaya Reintegrasi Sosial Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Semarang tentang Perubahan Atas Undang- belum berusia 18 tahun . WHO*. 9(1), 249–260.

BUKU

Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

Lenny Rosalin, D. (2016). *Kabupaten/ Kota Layak Anak, Bahan Advokasi Kebijakan KLA*. 20.

Moleong, L. J. (2021). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

Syafiie, I. K. (2010). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sunggono, Bambang. (1994). *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Widodo, J. (2018). *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK*. Yogyakarta: Media Nusa Creative.

Windiarto, T. (2020). Issn 2089-3523. *Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA)*.

SUMBER LAIN

BPS Kabupaten Boyolali. Katalog Boyolali dalam Angka 2023. Diakses di <https://boyolalikab.bps.go.id>.

Tri Widodo. “tercatat 163 pernikahan anak di bawah umur di boyolali ada yang hamil duluan,” 2021, 12 Agustus. Diakses pada 1 Mei 2022 di <https://solo.tribunnews.com/2021/08/12/tercatat-163-pernikahan-anak-di-bawah-umur-di-boyolali-ada-yang-hamil-duluan>

UNICEF. (2018). *Perlindungan anak di Indonesia - mengembangkan kebijakan dan peraturan yang kuat untuk setiap anak*. *Unicef*, 1–10.

[https://www.unicef.org/indonesia/media/5651/file/Perlindungan Anak di Indonesia.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/media/5651/file/Perlindungan_Anak_di_Indonesia.pdf)

<https://jateng.bps.go.id/indicator/30/1026/1/jumlah-anak-usia-0-18-tahun-korban-kekerasan-per-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/solo-jadi-rujukan-kabupaten-kota-layak-anak/>

Bank data Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

<https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>

Sindonews. (2014). Pemkab Boyolali Bakal Sekolahkan Ratusan Pekerja Anak.

diakses di <https://daerah.sindonews.com/berita/860949/22/pemkab-boyolali-bakal-sekolahkan-ratusan-pekerja-anak-pada-2023>.